

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agussalim. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Akil Mochtar. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Amanda Hale and John Edwards, 2006. "Getting its Taped", Computer and Communications Law Review.
- Andi Hamzah. 1985. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- , 1986. *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- , 1991. *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia.
- , 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baso Madiung. 2014. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Makassar: Makassar: CV Media.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek. 1985. *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht. Alphen aan den Rijn*: Samson H.D. Tjeenk Willink.
- Gregor Polancik. 2009. "Empirical Research Method Poster". Jakarta.

- H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Editor Muladi), Bandung: PT Refika Aditama. 2005.
- Himpunan BUJUKLAP, BUJUKLAP, BUJUKMIN, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta. 1990.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2020. *Mengatur Ulang Penjadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penjadapan di Berbagai Negara*, Jakarta: ICJR.
- I.G.M. Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: ILCP.
- J.W. Lapatra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books
- Jeremi Pope, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Jimly Ashiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2011. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jörg Kammerhofer. 2010. *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*. London & New York: Routledge.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Buku Panduan korupsi, Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara dalam penyelidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.

- Luhut M.P. Pangaribuan dkk, 2009. *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2014. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papasa Sinar Sinanti.
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Faal.1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maria Farida Indrati S. 2012. *Ilmu Perundang-undangan : Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, Yogyakarta: Kanisius.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marwan Effendy. 2005, *Kejaksaan RI- Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Modul Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*, Disusun oleh Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019.
- Muladi. 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Huda dan R Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Reda Manthovani, 2015. *Penyadapan Vs Privacy*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Ndongesia. Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2025. Ringkasan Eksekutif. Disusun oleh Tim Sosialisasi dan Penyusunan Profil Kejaksaan RI 2025 Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Jakarta: April 2009.
- Robert Klitgaard dkk, 2005. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Alih Bahasa Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rohim, 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Depok: Pena Mukti Media.
- Romlii Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bandung: Bina Cipta.
- , 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roni Soemitro Roni Hanitijo S, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- , 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suharto RM, 1997. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus A. T. Napitupulu, 2013. "Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP". Jakarta: Institue for Criminal Justice Reform (ICJR).

Syed Hussain Alatas, 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES.

Winarso Zain, 2004. *Korupsi Musuh Bersama*, Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi.

Yuliandri, 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Yunus Husein, 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace & Library.

-----, 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima.

DISERTASI, TESIS

Hardy Salim. ANALISIS KEABSAHAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TANPA IZIN PENGADILAN, Disertasi, Pascasarjana Universitas Tarumanagara, 2018.

Raditya Hidayat. PERANAN JAKSA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Klaten Tahun 2012), Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Rosana Prastuti, ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Thesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Muhammad Aziz Ridwan, KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis Magister Litigasi, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2018.

JURNAL, MAKALAH.

A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, 2010, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.

Bagir Manan. 2008. *Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya,

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri
Departemen Luar Negeri RI.

- Budi Setiyono. (2017). *Memahami Korupsi Di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar Dari Empat Studi Kasus*. Jurnal POLITIKA. Vol. 8, No. 1.
- Budhi Sarumpaet, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Disampaikan Pada Kegiatan Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas di Istora Senayan, Jakarta, 13/12/2023.
- Gita Santika Ramadhani. (2021). *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 1 (2021): 77-91, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.
- Gus Hosein dan Caroline Wilson Palwo. (2013). *Modern Safeguards for Modern Surveillance: An Analysis of Innovations in Communications Surveillance Techniques*, Ohio State Law Journal, Vol. 76. No. 6.
- Imam Fatkuroji, Selvi Diana Meilinda, (2021). *Pilihan Publik dalam Kasus Korupsi APBD dan Kepala Daerah*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi. Vol.7.No 2.
- Jawahir Thontowi, (2015). *Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2. Vol. 22.
- Kresna Yogi Pratama, (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol. 7. No.1. 2022.
- Muhadam Labolo. (2017). *Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 43, No. 2.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim. (2023). *Asas-Asas Hukum Penuntutan The Legal Principles Of Prosecution*, The Prosecutor Law Review, Volume 1, No. 1.
- Nurfaqih Irfani. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 16 No. 3.

- Prianter Jaya Hairi. 2015. *Revisi UU KPK: Pembenahan Hukum Penyadapan KPK*, Buletin Info Singkat, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Vol. VII, No. 13/I/P3DI/Juli/2015.
- R.M. Bagoes Radityo GK, Kristiwanto Kristiwanto, Ramlani Lina Sinaulan, (2021). *Kepastian Hukum Penyadapan Penyidikan Kejaksaaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’l. Vol.8.No.5.
- Rizky Oktavianto, dkk, (2021). *Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 117-131 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473>.
- Romly Atmasasmita, “Independensi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum”, makalah, Jakarta: BPHN.
- Wasingatu Zakiah. (2001). *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, makalah, Jakarta.

KAMUS

Kamus Hukum, 2002

The Lexicon Webster Dictionary, 1978

Black, Henry Champbell, 1990. *Black’s Law Dictionary*, Edition VI, West Publising, ST Paul Minesota

Echols Jhon M. dan Shadaly Hasan, 1987. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Kramer SR A.I.N, 1997. *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 25 Mei 2023.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 97/PID.SUS-TPK/2016/PN.SMG tanggal 25 Oktober 2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLG/.

Putusan PN SERANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG Tanggal 31 Oktober 2023.

Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 006/ PUU-I/2003 bertanggal 30 Maret 2004.

Putusan Nomor 012-016-019/ PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006.

Putusan Nomor 5/PUUVIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK; Jakarta, 2022, 2023.

SURAT KABAR DAN INTERNET

Dedy Triyanto Ari Rahmad dkk, *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*, disadur dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6054/4551>. Data akses 25 Agustus 2022 pukul 21.15 wita.

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/papers-antikorupsi/1434-komitmen-global-indonesia-pada-united-nations-convention-against-corruption-uncac-dan-g20-anti-corruption-working-group-acwg>, data akses 17 September 2022 pukul 21.35 wita.

Dikutip dari: <https://www.transparency.org/en/cpi/2021> data akses pada hari Kamis, 12 September 2022 pukul 21.15 wib.

<https://icjr.or.id/catatan-terhadap-upaya-hukum-yang-dilakukan-oleh-buronandpo-dalam-perkara-pidana-di-indonesia/>.

Muh. Ibnu Fajar Rahim (2022), “Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, diakses tanggal 19 Maret 2023, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar->

[rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r.](#)

[https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa.](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa)

Indonesia Corruption Watch, “Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik” 2018, dapat diakses di WWW: [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/outlook_desa_2018 - icw.pdf.](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/outlook_desa_2018_-_icw.pdf)

“Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award”, Kompas.com (14/12/2017) pukul 21:03 WIB.

“Segudang Prestasi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sebelum Dijemput KPK”, Kompas.tv (27/02/2021), pukul 14:23 WIB.

Farhan, Y. (2018). *The Politics Of Budgeting In Indonesia* [University of Sydney]. [http://hdl.handle.net/2123/18624.](http://hdl.handle.net/2123/18624)